

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam menciptakan perubahan. Seorang ahli yakni John Dewey (2003: 69), beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Pergeseran paradigma pendidikan menjadi pendidikan abad-21 memberi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara pendidikan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi kompetensi ilmu, teknologi, keterampilan, dan sikap menjadi bagian pendidikan yang harus difokuskan penanganannya demi terwujudnya tujuan pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan menggunakan suatu panduan sebagai arah berjalannya proses pembelajaran. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang dijadikan acuan satuan jenjang pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum juga dapat dijadikan media untuk mencapai tujuan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan (Zainal Arifin, 2011 : 25). Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan penerapan kurikulum hingga yang terakhir menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sejak tahun 2006 KTSP diterapkan dan mulai berkembang, namun pada akhirnya

harus dinyatakan bahwa KTSP kurang mampu untuk mencakup seluruh aspek pendidikan dan hanya berfokus pada aspek pengetahuan saja.

Tuntutan kompetensi abad-21 harus dipenuhi. Demi terwujudnya hal tersebut penyelenggaraan pendidikan tidak dapat mengandalkan KTSP 2006 yang kurang mencakup segala aspek yang dibutuhkan dalam perkembangan kebutuhan zaman. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan yang akan dihadapi. Akhirnya pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari KTSP yang diberi nama dengan Kurikulum 2013.

Kurikulum ini diberlakukan untuk menjawab tantangan internal dan eksternal yang terjadi. Tantangan internal terkait dengan tuntutan 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor pengembangan penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan perubahan zaman yang terus terjadi. Pengembangan Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan produktif, kreatif, inovatif serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013 meliputi 4 (empat) aspek yakni perubahan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian (Kemendikbud, 2013).

Perubahan yang terjadi pada Kurikulum 2013 mempunyai penekanan dalam pelaksanaan Kurikulum tersebut. Penekanan perubahan tersebut terdapat pada Standar Penilaian. Dalam standar tersebut semula pada KTSP

hanya ditekankan dalam aspek pengetahuan saja, namun Kurikulum 2013 menekankan penilaian pada tiga aspek yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang masing-masing nanti akan dideskripsikan oleh guru pada rapor peserta didik. Secara jelas maka dapat diketahui bahwa penilaian pada Kurikulum 2013 menggunakan teknik penilaian autentik.

Penilaian autentik dilaksanakan oleh pendidik. Tujuan dari penilaian ini untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Menurut Hartati Muchtar (2010) penilaian merupakan integral dari proses pembelajaran. Penilaian sering dianggap sebagai salah satu dari tiga pilar yang menentukan proses pembelajaran. Ketiga pilar tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

*Clemest dan Corps* dalam (*Crisp, 2016*), menyatakan penilaian merupakan komponen penting dalam belajar dan lingkungan pembelajaran serta memiliki peran dalam mengetahui hasil pembelajaran. Melalui penilaian hasil belajar yang menjadi tolak ukur guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran dan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, penilaian harus direncanakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan standar penilaian yang diamanatkan pemerintah.

Standar Penilaian Pendidikan mengacu pada Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum 2013 Edisi

revisi, meskipun Kurikulum 2013 telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, namun standar penilaian tetap mengacu pada Permendikbud tersebut. Dalam peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Melalui pemberlakuan kurikulum 2013 diharapkan adanya perbaikan dalam sistem penilaian. Adapun penilaian pada Kurikulum ini menggunakan teknik penilaian autentik yang memberikan penekanan dalam penilaian peserta didik guna mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam penilaian serta menajamkan tujuan sebenarnya dari penyelenggaraan Kurikulum 2013 yang beralih fokus dari guru kepada siswa.



**Gambar I.1**  
**Proporsi Aspek Penilaian Satuan Jenjang Pendidikan**

*Sumber : Kemendikbud, 2013*

Gambar di atas dapat menjelaskan bahwa penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan karakteristik peserta didik dengan jenjangnya. Dengan demikian pada jenjang yang lebih rendah cenderung lebih banyak menggunakan teknik penilaian *soft skill*. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah lebih banyak menggunakan teknik penilaian *hard skill* (pengukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan) daripada *soft skill* (penilaian sikap ilmiah, penilaian diri, dan bekerja sama dalam tim). Apabila dicermati melalui gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) proporsi penekanan penilaian cukup seimbang disetiap aspeknya. Hal ini mengartikan bahwa guru yang mengajar pada jenjang tersebut harus melakukan penilaian secara seimbang karena setiap aspek menjadi penekanan dalam melakukan penilaian.

Pembelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang mempunyai muatan materi yang banyak dan bersifat kualitatif. Peserta didik sering menganggap sukar mata pelajaran ini karena berpikir bahwa mereka dituntut untuk menghafal sehingga banyak peserta didik menjadi bosan dan kurang tertarik pada mata pelajaran ini. Pada kenyataannya, pelajaran ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Kurangnya pengimplementasian materi pembelajaran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu penyebab peserta didik kurang

memahami maksud dan tujuan dari materi pembelajaran ekonomi itu sendiri sehingga membuat perasaan bosan dan kurang tertarik. Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri untuk guru dalam menciptakan suasana kondusif agar mendukung proses penilaian masing-masing peserta didik.

Penerapan Kurikulum 2013 menimbulkan banyak polemik. Guru merasa kesulitan dalam melakukan penilaian disebabkan keterbatasan pemahaman guru terhadap penilaian autentik. Kesulitan yang dihadapi guru dalam melakukan penilaian autentik diantaranya belum terbiasa guru melakukan perencanaan penilaian, banyaknya aspek sikap yang dinilai dan aturan penilaian yang terus berubah (Entis Sutisna: 2014). Guru-guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian lantaran terdapat banyak aspek yang dinilai sehingga membuat guru memberikan penilaian yang tidak optimal karena banyaknya jumlah siswa yang harus diberikan nilai (Tempo.co: 2014).

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan SMA yang diterbitkan pada tahun 2017 memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013, bahwa salah satu permasalahan utama adalah penilaian hasil belajar peserta didik, antara lain :

1. Masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam penilaian sikap spiritual (KI-1), dan sikap sosial (KI-2)
2. Masih banyak guru yang belum terbiasa menggunakan beberapa teknik penilaian, seperti portofolio dan proyek dalam melakukan penilaian keterampilan

3. Sekolah mengalami kesulitan dalam melakukan interval nilai predikat pengetahuan dan keterampilan yang merujuk KKM untuk batas minimal predikat C
4. Pemahaman dan implementasi remedial di sekolah masih banyak persepsi yang berbeda-beda

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar pada Kurikulum 2013, yang berarti merupakan teknik penilaian autentik belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prof. Ani Rusilowati, M.Pd, sebanyak 20 dari 23 guru di SMP 21 Semarang, hingga 87 persen guru masih kesulitan dalam memahami cara penilaian Kurikulum 2013. Hasil penelitian mengatakan bahwa guru mengalami kesulitan dalam membuat instrumen penilaian (unnes.ac.id, 2014).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa seluruh sekolah wajib menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2018,2019. Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhamad mengatakan bahwa tahun 2018 adalah tahun terakhir pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Tahun ini semua sekolah harus menggunakan Kurikulum 2013 tanpa terkecuali (Kompas.com: 2018). Sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia, kota Depok juga mengikuti kebijaksanaan yang diberlakukan.

Kota Depok mempunyai 15 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang tersebar di wilayahnya. Guna mendukung dan menyukseskan imbauan yang

dikeluarkan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Depok, maka diadakannya bimbingan teknis (Bimtek) implementasi Kurikulum 2013 pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2018 (radardepok.com: 2018). Dengan demikian seharusnya dapat dinyatakan bahwa seluruh SMA Negeri di kota Depok telah menerapkan pembelajaran dan penilaian Kurikulum 2013. Dari hasil pengamatan peneliti maka diketahui bahwa terdapat 5 sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 sejak awal diberlakukan. Salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum tersebut adalah SMA Negeri 4 Depok. SMA ini mempunyai 4 guru ekonomi yang mengajar tetap.

Pelaksanaan penilaian autentik di SMA Negeri 4 Depok belum pernah dievaluasi. Hal tersebut diketahui penelitian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru ekonomi bernama Susanto yang mengatakan *“Sejak diberlakukannya Kurikulum tersebut belum pernah diadakan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan penilaian autentik di SMA Negeri 4 Depok”*. Guru ekonomi juga mengatakan bahwa penerapan Kurikulum 2013 membuat para guru menjadi kewalahan karena banyak tuntutan yang diberikan kepada guru terutama dalam pelaksanaan penilaian. Aspek sikap dan keterampilan menjadi kendala bagi guru ekonomi di SMA Negeri 4 Depok. Pada aspek sikap, guru dituntut untuk memberikan penilaian kepada satu persatu siswa dan hal ini menjadikan penilaian membutuhkan waktu yang lama dan guru sulit untuk memperhatikan keseluruhan siswa apalagi Pak Susanto mengajar di 8 kelas untuk pelajaran ekonomi. Pada aspek keterampilan dikatakan bahwa guru kesulitan untuk melakukan penilaian

pada aspek ini karena materi ekonomi yang kebanyakan hanya sebatas teori saja. Pak Susanto juga mengatakan bahwa biasanya guru kesulitan untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan perencanaan. Pada tahap pelaporan pak Susanto merasa kesulitan karena banyak nilai yang harus diinput apalagi ketika terdapat beberapa siswa yang belum mengumpulkan nilai.

Penilaian hasil belajar yang telah diperbarui dengan adanya Kurikulum 2013 harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pasal 57 ayat (1), bahwa evaluasi harus dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya peserta didik, lembaga dan program pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran ekonomi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai “Evaluasi Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Edisi Revisi Pada Pembelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 4 Depok”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi perencanaan (*Antecedents*) penilaian autentik pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Depok?

2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan (*Transaction*) penilaian autentik pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Depok ?
3. Bagaimana evaluasi pelaporan (*Outcomes*) penilaian autentik pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Depok ?

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat menjadi harapan positif bagi seluruh elemen. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai standar, konsep dan pelaksanaan penilaian autentik dalam implementasi Kurikulum 2013 serta membekali diri peneliti sebagai calon guru.

2. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pelaksanaan penilaian autentik, memberikan masukan dan membantu memecahkan masalah atau kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik.

3. Secara umum

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan sosial untuk diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya untuk para pendidik saat melaksanakan penilaian hasil belajar.

4. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan penguatan apabila terdapat mahasiswa lain yang ingin meneliti hal yang serupa.